

**PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM
MENANGGULANGI ANAK PUTUS SEKOLAH PADA
TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
TAHUN 2012-2015**

Ricardo Saputra

Email : edo.212.@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

A high rate of school dropouts and students who do not continue their education, especially at primary school level, reflects the still limited access to education that could reach the community. Pekanbaru City Department of Education as part of the governance system Pekanbaru implementing the policy and technical education has the responsibility and authority to improve the quality of education in the city of Pekanbaru. The purpose of this study was to determine the role of Pekanbaru City Department of Education in addressing the dropout at the level of primary school education from 2012 to 2015 year. Data analysis method used in this research was qualitative descriptive analysis which seeks explained by phenomena that exist and explore all the facts relating to the issues discussed based on the results of research: the role of Education Department of Pekanbaru in addressing the dropout at the level of school education basic Year 2012-2015.

The study states the role of Pekanbaru City Department of Education in addressing dropouts at primary school education level Years 2012-2015 not optimally performing well for the Impact Indicators (Impacts) is still weak supervision of Pekanbaru City Department of Education regarding the management of BOS funds so that there are indications BOS funds misuse. If the government really wants to liberate Indonesia from the child's education cost of education / school, then in case the Government to subsidize the education BOS with a larger amount, so there is no school that levy levy funds from students / parents.

Keywords: Role of Education Office of Pekanbaru, Dropouts, Elementary School, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tiang pancang kebudayaan dan pondasi utama untuk membangun peradaban bangsa. Kesadaran akan arti penting pendidikan akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir batin dan masa depan warganya. Oleh karena itu substansi pendidikan, materi pengajaran dan metodologi pembelajaran, serta manajemen pendidikan yang akuntabel susah seharusnya menjadi perhatian bagi para penyelenggara Negara. Terbukti bahwa seluruh bangsa yang berhasil mencapai tingkat kemajuan kebudayaan dan teknologi tinggi mesti disangga oleh kualitas pendidikan yang sangat kokoh (Panagan, 2013).

Sejalan dengan itu semua pemerintah mempunyai tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut : Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan yang hendak dicapai pemerintah Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sejak orde baru telah mengadakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah suatu instansi pemerintah yang menangani jenjang

pendidikan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK sederajat di kota Pekanbaru. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana kebijakan dan teknis kependidikan mengembangkan Visi tersebut menjadi Misi Pendidikan, yaitu : *“Menjadikan Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Pendidikan Yang Berkualitas, Berbudaya Dan Religius Untuk Mencapai Masyarakat Madani”*

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk menurunkan angka putus sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar (wajib) Sembilan tahun harus memperoleh perhatian yang serius. Adanya program wajib belajar (wajib) sembilan tahun dari pemerintah juga ternyata belum dapat menuntaskan permasalahan anak putus sekolah terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kota Pekanbaru.

Anak putus sekolah pada tingkat SD di Kota Pekanbaru selalu menurun setiap tahunnya, namun pada sisi program wajib belajar masih ada anak yang berusia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya. Padahal Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).

Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD atau MI hingga kelas Sembilan SMP atau MTs.

Fenomena anak putus sekolah merupakan topik yang tidak pernah selesai dibicarakan, dibalik pentingnya pendidikan masih sangat banyak kita jumpai fenomena anak putus sekolah disekitar kita, baik di daerah Kota-Kota besar di Indonesia, maupun di daerah-daerah pedesaan. Terkait dengan hal di atas semua dunia pendidikan mempunyai masalah dan tidak berjalan semestinya sesuai dengan tujuan Negara dan semua aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai dunia pendidikan baik menurut UUD 1945 dan pancasila.

Kebijakan pemerintah memberikan bantuan dana BOS bertujuan meringankan beban pendidikan pada kenyataannya memang membantu berjalannya proses pendidikan akan tetapi kebijakan ini belum mampu mengatasi segala persoalan pendidikan diantaranya ialah masalah putus sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2012-2015?

Peran

Menurut Thoha (2007 : 44) peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota

masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Kinerja Organisasi

Konsep kinerja (*Performance*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment*. Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama dalam sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen. (Mathis, 2011:128)

Menurut Armosudiro (2006:12) organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Organisasi pemerintahan menggunakan alat, teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari

Sobandi (2006 : 179-181) dan para ahli lainnya dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah, berikut adalah indikator kinerja organisasi :

- a. Keluaran (*Output*)
- b. Hasil
- c. Kaitan Usaha dengan
- d. Informasi Penjelasan

Sedangkan menurut Bastian (dalam Tangkilisan, 2010:175) menyatakan indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator berikut ini:

- a. Indikator masukan (*inputs*).
- b. Indikator keluaran (*outputs*).
- c. Indikator manfaat (*benefit*).
- d. Indikator dampak (*impacts*).

Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya kejenjang pendidikan berikutnya (Gunawan 2010: 18).

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah

lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai (Musfiquon, 2007: 19). Padahal anak adalah manusia yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya dan sebagai estafet untuk masa yang akan datang (D. Gunarsa, Singgih, 2010: 42).

Siswono Yudo Usodo dalam D. Gunarsa, Singgih (2010 : 43) mengemukakan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam, yang kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data. Metode penelitian kualitatif juga digunakan untuk memahami makna dibalik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan orang (Iskandar, 2010 : 76).

Penelitian ini dilakukan di SDN 37 Pekanbaru di Jalan Garuda Sakti – Kel. Simpang Baru Kec. Tampan dan SDN 45 Pekanbaru di Jalan Badak– Kel. Sail Kec. Tenayan Raya, khususnya pada kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Alasan pengambilan penelitian di lokasi ini adalah karena dua sekolah yang

penulis pilih terdapat siswa yang putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, disamping itu juga disebabkan karena belum adanya penelitian ilmiah yang mengungkapkan masalah seperti yang dikemukakan pada penelitian ini.

Dalam setiap penulisan, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penulisan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara.
- b. Observasi
- c. Studi Dokumen

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, maka analisis data disajikan dalam bentuk analisa. Data dikumpulkan melalui informan, informan penulisan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokkan data menurut jenisnya. Data yang didapat dilapangan dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM MENANGGULANGI ANAK PUTUS SEKOLAH PADA TINGKAT PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2012-2015

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai bagian dari sistem pemerintahan Kota Pekanbaru pelaksana kebijakan dan teknis kependidikan mengembangkan Visi tersebut menjadi Misi Pendidikan, yaitu : *“Menjadikan Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Pendidikan Yang Berkualitas, Berbudaya Dan Religius Untuk Mencapai Masyarakat Madani”*

Maka dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan apa saja peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar tahun 2012-2015, didasarkan pada pelayanan yang diberikan kepada publik didasarkan pada indikator-indikator:

Indikator masukan (inputs)

Maksud dari indikator ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa yang meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh 2 (dua) staff seksi yaitu Seksi Pendidikan Dasar dan

Seksi Pendidikan Masyarakat. Kedua seksi tersebut melaksanakan tugasnya berbeda namun dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan yang sama yaitu mengatasi permasalahan putus sekolah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing seksi tersebut:

Melihat dari TUPOKSI masing-masing bidang, penulis berasumsi Seksi Pendidikan Dasar bertujuan untuk menuntaskan pendidikan dasar yaitu wajib belajar. Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD atau MI hingga kelas Sembilan SMP atau MTs. Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.

Sedangkan pada seksi Pendidikan Masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinnya pengembangan pendidikan

masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat.

Melihat dari tujuan masing-masing seksi pemerintahan di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan berdasarkan tujuan penelitian ini, penulis lebih memilih Seksi Pendidikan Dasar sebagai landasan penelitian, karena pada seksi tersebut terlihat upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak terjadinya putus sekolah pada siswa sedang dalam masa pendidikan.

Indikator Keluaran (*outputs*)

Maksud dari indikator keluaran yaitu segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non fisik. Bentuk kegiatan ini adalah program-program atau langkah-langkah yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk mengatasi anak putus sekolah salah satunya pada tingkat sekolah dasar adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Menurut PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku.

Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online.

Dana Bos yang diterima pada tingkat sekolah dasar dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya tahun

2012 s/d 2014 jumlah dana yang diterima Rp. 580.000 / siswa / tahun, kemudian pada tahun 2015 Pemerintah menaikkan alokasi dana BOS yang saat ini Rp 580 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 800 ribu/siswa/tahun. Dana BOS disalurkan setiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Program BOS dalam pemanfaatannya adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Beasiswa

Pendidikan bisa dikatakan adalah salah satu kunci pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Adanya Beasiswa adalah salah satu wujudnya. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tertentu kepada perorangan yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Jenis-jenis beasiswa kini bermacam-macam diantaranya :

- a. Full beasiswa (100% *tuition reduction*)..
- b. Beasiswa untuk meringankan biaya pendidikan (*tuition reduction*).
- c. Beasiswa yang diberikan secara berkala/rutin.
- d. Beasiswa yang hanya diberikan sekali waktu.

Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Meski dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan dapat meningkatkan

jumlah keikutsertaan siswa/peserta didik, tetapi masih banyak anak-anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua/keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatarbelakangi dikembangkan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah.

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

Program BSM dilaksanakan oleh 2 (dua) Kementerian yang berbeda, yaitu Bantuan Siswa Miskin

(BSM) bagi sekolah reguler yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan BSM bagi siswa yang bersekolah di Madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sumber dana semua bantuan ini adalah dari APBN. Alokasinya tertuang dalam DIPA di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta DIPA Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil uraian tentang program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu BOS, Beasiswa dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dapat disimpulkan segala bentuk bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bertujuan untuk meringankan beban siswa dalam menempuh pendidikan dasar.

Indikator Hasil (*outcomes*)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Melihat dari beberapa program yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk mengatasi anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar di Kota Pekanbaru sejak tahun 2012-2015 melalui program BOS, Beasiswa dan BSM.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah berperan secara maksimal untuk mengatasi anak putus sekolah terutama pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Namun Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga menganjurkan agar pihak sekolah agar berperan secara aktif untuk ikut

mengatasi permasalahan anak putus sekolah, karena dalam bantuan yang mereka terima yaitu BOS, Beasiswa maupun BSM harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Pekanbaru baik secara lisan maupun tulisan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan benar yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, permasalahan anak putus sekolah tidak hanya tugas Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru namun pihak sekolah selaku penerima bantuan juga ikut berpartisipasi dalam mengatasi anak putus sekolah yaitu Kepala Sekolah dan guru.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah antara lain:

1. Memilih cara dan metode mengajar yang tepat termasuk memperhatikan penampilannya.
2. Menginformasikan dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
3. Menghubungkan kegiatan belajar dengan minat siswa.
4. Melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran misalnya melalui kerja kelompok
5. Melakukan evaluasi dan menginformasikan hasilnya, sehingga siswa mendapat informasi yang tepat tentang keberhasilan dan kegagalan dirinya.
6. Melakukan improvisasi-improvisasi yang bertujuan untuk menciptakan rasa senang anak terhadap belajar. Misalnya kegiatan belajar diseling dengan bernyanyi bersama atau sekedar bertepuk tangan yang meriah

7. Menanamkan nilai atau pandangan hidup yang positif tentang belajar misalnya dalam agama islam belajar dipandang sebagai sebuah kegiatan jihad yang akan mendapatkan nilai amal disisi Allah.
8. Menceritakan keberhasilan para tokoh-tokoh dunia yang dimulai dengan mimpi-mimpi mereka dan ceritakan juga cara-cara mereka meraih mimpi-mimpi itu.
9. Mengajak siswa untuk bermimpi meraih sukses dalam bidang apa saja seperti mimpinya para tokoh dunia tersebut.
10. Memberikan respon positif kepada siswa ketika mereka berhasil melakukan sebuah tahapan kegiatan belajar. Respon positif ini bisa berupa pujian, hadiah, atau pernyataan-pernyataan positif lainnya.

Selain itu, guru juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengatasi masalah tersebut ketika permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang serius yang tidak bisa diantisipasi oleh guru sendiri atau oleh orang tua sendiri, maka kerja sama antara guru dan orang tua harus segera dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan di antaranya :

1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siswa, cari faktor penyebab yang mengakibatkan rendahnya motivasi belajar siswa, identifikasi masalahnya.
2. Mencari solusi-solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada anak. Cari masalah yang bisa diatasi oleh guru, atau masalah yang bisa diatasi oleh orang tua.

3. Memberikan perlakuan yang tepat terhadap anak, mereka sedang mengalami permasalahan, maka orang tua dan guru harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk tidak menambah beban mereka dengan menyalahkan, mencemooh anak-anak.
4. Melibatkan siswa untuk memecahkan permasalahannya. Orang tua, guru dan siswa perlu duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahannya.

Indikator Manfaat (*benefit*)

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengatasi anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, dapat dilihat dari manfaat tersebut bantuan BOS yang dialokasikan khusus siswa miskin tidak 100% (seratus persen) namun bantuan tersebut ada batasan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena BOS diperuntukkan untuk segala kegiatan pendidikan salah satunya bantuan siswa miskin.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana BOS yang diterima masing-masing sekolah tidak sama jumlahnya dan pengalokasian dana BOS untuk siswa miskin dibatasi jumlahnya, karena dana tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut kecuali beasiswa dan BSM diterima 100% oleh siswa bersangkutan.

Tujuan program pemberian bantuan beasiswa itu, untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas prestasi

siswa. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apabila siswa tidak memiliki biaya, biasanya siswa itu *drop out* dari sekolahnya. Dengan bantuan beasiswa itu diharapkan dapat menekan angka *drop out* sekolah di masyarakat. Program yang telah berjalan ini telah cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas prestasi siswa.

Indikator Dampak (*Impacts*)

Pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar di Kota Pekanbaru, salah satunya pemberian BOS, Beasiswa dan BSM dapat dilihat dampak bantuan tersebut:

Dari hasil audit dan pengolahan data di lapangan, maka diperoleh statistik penyelewangan dana BOS dan pendidikan dasar lainnya sebagai berikut :

1. Sebanyak 62.85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL (indikasi korupsi). Sebanyak 62,84% sekolah yang disampling tidak mencantumkan seluruh penerimaan dana BOS dan DPL dalam RAPBS dengan nilai Rp 479,96 miliar [TA 2007] dan Rp 144, 23 miliar [TA 2008 semester I]. Padahal salah satu media perencanaan yang dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyalahgunaan ini disebabkan oleh :

- 1) petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS dan 2) Kepala sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah.
2. Sebanyak 4.12% sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya. Dari 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, diperoleh 47 SD (27 SD Negeri dan 20 SD Swasta) dan 123 SMP (95 SMP Negeri dan 28 SMP Swasta) di 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstra kurikuler, sumbangan pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada siswa.
3. Dana BOS sebesar Rp28.14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya (indikasi korupsi).

Fakta dilapangan: dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah (sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp 28.14 miliar dengan sebagai berikut:

1. Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru.
2. Uang lelah kepala sekolah.
3. Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan).
4. Dana BOS digunakan untuk membeli *laptop*, *PC desktop*, *flash disk*, dan peripheral

komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid.

5. Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain.
6. Pembelian *voucher hand phone*, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah sambut kepala dinas, pembelian *note book* dan *PC desktop*.
7. Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat.
8. Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda.
9. Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
10. Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau kabupaten).
11. Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti diperbolehkan dalam juklak)

Hasil penelitian tentang program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau sejenis dengan beasiswa serta prestasi belajar nampaknya bukanlah hal yang baru lagi. Dari penelitian mahasiswa yang berkenaan dengan program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau sejenis dengan beasiswa diantaranya,

yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Il Maknun, Jurusan Manajemen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2006 dengan judul “Efektifitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Al-Madzhah Ciheulang Bogor”. Dari penelitian ini, bantuan operasional sekolah (BOS) dan peningkatan mutu pendidikan ternyata sangat berpengaruh satu sama lain sehingga pemberian bantuan dana BOS bisa ditingkatkan dengan tujuan mampu memberikan kemajuan bagi pendidikan Indonesia agar lebih bermutu atau berkualitas.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Majid, Jurusan Kependidikan Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2003 dengan judul “Peran bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan minat menyekolahkan anak”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kesimpulan bantuan operasional sekolah telah berperan dalam rangka meningkatkan minat menyekolahkan anak melalui peringanan SPP atau iuran bulanan siswa, dan hal ini adalah cara yang baik dilakukan oleh sekolah meningkatkan kondisi sebagian besar orang tua siswa berdasarkan data bekerja mayoritas sebagai pekerja tidak tetap.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dwi Permata, Jurusan Kependidikan Islam Manajemen

Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 dengan judul “ Studi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dalam mensukseskan wajib belajar Sembilan tahun di MTs Unwaanunnajah Pondok Aren Tangerang Selatan”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan kesimpulan bantuan operasional sekolah telah membantu dalam meringankan biaya pendidikan di sekolah tersebut, karena penggunaan dana BOS dialokasikan pada pos-pos yang tepat sesuai dengan RAPBS (Rencana Anggaran Penggunaan Belanja Sekolah) yang telah ditetapkan sebelumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar tahun 2012-2015, didasarkan pada pelayanan yang diberikan kepada publik berdasarkan indikator yang diteliti, dapat disimpulkan:

1. Indikator masukan (*inputs*) bahwa peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan oleh 2 (dua) staff seksi yaitu Seksi Pendidikan Dasar dan Seksi Pendidikan Masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian ini, penulis lebih memilih Seksi Pendidikan Dasar sebagai landasan penelitian, karena pada seksi tersebut

terlihat upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak terjadinya putus sekolah pada siswa sedang dalam masa pendidikan.

2. Indikator Keluaran (*outputs*) program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk menanggulangi anak putus sekolah salah satunya pada tingkat sekolah dasar adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa dan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
3. Indikator Hasil (*outcomes*) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah berperan secara maksimal untuk menanggulangi anak putus sekolah terutama pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Namun Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga menganjurkan agar pihak sekolah agar berperan secara aktif untuk ikut mengatasi permasalahan anak putus sekolah, karena dalam bantuan yang mereka terima yaitu BOS, Beasiswa maupun BSM harus dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Pekanbaru baik secara lisan maupun tulisan.
4. Indikator Manfaat (*Benefit*) dana BOS yang diterima masing-masing sekolah tidak sama jumlahnya dan pengalokasian dana BOS untuk siswa miskin dibatasi jumlahnya, karena dana

tersebut digunakan untuk keperluan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut kecuali beasiswa dan BSM diterima 100% oleh siswa bersangkutan.

5. Indikator Dampak (*Impacts*) karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang pengelolaan dana BOS sehingga terjadi indikasi penyalahgunaan dana BOS, namun berdasarkan hasil penelitian tentang program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau sejenis dengan beasiswa menyatakan berperan dalam rangka meningkatkan minat menyekolahkan anak melalui peringanan SPP atau iuran bulanan siswa, dan hal ini adalah cara yang baik dilakukan oleh sekolah meningkatkan kondisi sebagian besar orang tua siswa berdasarkan data bekerja mayoritas sebagai pekerja tidak tetap.

Saran

Adapun saran atau masukan kepada beberapa pihak yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini:

1. Untuk pemerintah, jika memang pemerintah benar-benar ingin membebaskan pendidikan anak Indonesia dari biaya pendidikan/sekolah maka sekiranya pemerintah memberikan subsidi pendidikan BOS dengan jumlah yang lebih besar, agar tidak ada lagi sekolah yang

- memungut pungutan dana dari siswa/orang tua siswa,
2. Pengawasan yang lebih efektif dan efisien juga mendukung pencapaian tujuan dana bos. solusi lain yang bisa di coba adalah pendampingan oleh ahli yang kompeten mempermudah pengelolaan dan efektifitas dana BOS, seperti mahasiswa atau para ahli menjadi pendamping utama dan ikut membantu dalam mengarahkan hal ini dikarenakan kurangnya tenaga professional terkait administrasi dan manajemen Sekolah yang ada di Sekolah.
 3. Bagi sekolah yang diharapkan dapat mengelola dan mengalokasikan dana tersebut dengan benar dan tepat sesuai prosedur yang berlaku dan tepat sasaran sehingga dapat lebih meningkatkan tercapainya tujuan pendidikan. Sekolah juga harus mengikuti ketentuan dan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Contoh seperti transparan dalam mengelola dan mengumumkannya.
 4. Kepada siswa yang menerima BOS atau bantuan lainnya seperti beasiswa atau Bantuan Siswa Miskin (BSM), hendaknya memanfaatkan bantuan tersebut sebagai motivasi untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Armosudiro, Pradjudi. 2006. *Konsep Organisasi*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- D. Gunarsa. Singgih. Yulia singgih D. Gunarsa. 2010. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Gunawan H Ary. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial : Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta : Penerbit GP Pres.
- Mathis L. Robert-John H. Jackson. 2011. *Human Resources Management 10th ed*. Jakarta. Salemba Empat.
- Musfiqon. 2007. *Menangani yang Putus Sekolah*. [http : //www. surya. co. id/ web / Opini / Menangani - yang- Putus-Sekolah.html](http://www.surya.co.id/web/Opini/Menangani-yang-Putus-Sekolah.html). (diakses tanggal 15 Oktober 2015)
- Ruky. 2001. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta, Bumi Aksara.

- Sobandi Baban dkk. 2006.
*Desentralisasi dan Tuntutan
Penataan Kelembagaan
Daerah*. Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2010.
Manajemen Publik. Jakarta :
Penerbit Grasindo
- Thoha, Miftah. 2007, *Pembinaan
Organisasi (Proses
Diagnosa dan Intervensi)*,
Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.